

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi.

Laporan keuangan yang menyajikan informasi sangat dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah sebagai aparat yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya guna mencapai *Good Government Governance*, dicerminkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah dalam gambarannya mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan juga merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Pentingnya laporan keuangan daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas

dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaporan keuangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, dan (6) Laporan Perubahan Ekuitas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Fungsi laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan, posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, perubahan posisi entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Oleh karena itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintah, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011).

Laporan keuangan harus mempunyai nilai karena, informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Suwardjono, 2005). Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2008 memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2004 sampai dengan 2007 menunjukkan kualitas yang semakin memburuk. Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan semakin banyak, dan sebaliknya, persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang informasi keuangannya dapat diandalkan semakin sedikit. Pemeriksaan Semester II Tahun 2008 difokuskan pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan kinerja, selain menyelesaikan pemeriksaan keuangan atas lembaga pemerintah pusat dan daerah. Objek pemeriksaan seluruhnya 683 buah terdiri dari 424 objek PDTT, 59 objek pemeriksaan kinerja dan 200 objek pemeriksaan keuangan.

Buruknya laporan kualitas laporan keuangan daerah ditunjukkan bahwa dari 191 LKPD yang diperiksa, sebanyak 72 LKPD memperoleh opini Tidak Wajar (TW), 110 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan hanya satu daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain berupa opini, hasil pemeriksaan BPK RI atas 191 LKPD telah menemukan 3.051 kasus senilai Rp. 9,93 triliun terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari jumlah tersebut, sebanyak 556 kasus senilai Rp. 310,86 miliar merupakan kategori kerugian. (<https://syukriy.wordpress.com>).

Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Wilayah Banten Nomor : 15a/LHP/XVIII.SRG/05/2014-Tanggal 25 Mei 2015 terdapat beberapa temuan BPK-RI yang berpotensi adanya dugaan korupsi TA 2014 Pemda Provinsi Banten sebesar Rp.7.731.478.095.01. dan hasil analisa dari dokumen BPK-RI dan hasil LKPD Tahun 2014 adalah sebesar Rp.921.130.599.811.65 atau hampir satu triliun. Sejak berdirinya Pemda Provinsi Banten Tahun 2014 adalah hal yang sangat terburuk. Kondisi yang sangat buruk diduga didapati pada kondisi makro realisasi APBD Pemda Provinsi Banten Tahun 2014. (lenteranews.com)

Berdasarkan fenomena di atas dinyatakan bahwa perkembangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2004 sampai dengan 2007 menunjukkan kualitas yang semakin memburuk. Persentase LKPD yang informasi keuangannya tidak dapat diandalkan semakin sedikit. Seperti ketiadaan program yang terpadu dari Pemerintah untuk memperbaiki sistem keuangan negara sesuai dengan paket

Tiga Undang-undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa program yang terpadu dari Pemerintah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian kegiatan Dialog Publik untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi sistem informasi. Disinilah peran aparatur sebagai sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik untuk mengelola keuangan daerah. (Tuasikal,2007).

Menurut Syafarudin (2008), Kualitas sumber daya manusia adalah sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi. Kualitas dan karakteristik pegawai yang diperlukan oleh organisasi pada hakikatnya tidak terlepas dari tantangan-tantangan bersaing yang akan dihadapi oleh organisasi sekarang maupun di masa yang akan datang.

Suatu laporan keuangan haruslah disusun oleh sumber daya manusia dengan kemampuan akuntansi yang memadai sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan. Kualitas sumber daya manusia dinilai dari (a) kapasitas

staff, (b) tupoksi, (c) pengembangan (GTZ dan USAID/CLEAN urban 2001 dalam Indriasari, 2008).

Penerapan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) mencakup adanya (a) perangkat, (b) pengelolaan data keuangan, (c) perawatan (Jurnali dan Supomo dalam Indriasari, 2008).

Dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan penerapan teknologi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang baik sehingga laporan keuangan dapat lebih akurat dan laporan keuangan dapat disajikan secara lengkap, serta penyusunan laporan keuangan menjadi lebih cepat. Penerapan SIMDA dapat dilihat dari segi kelemahan dalam pengelolaan data keuangan, kelemahan perangkat dan kelemahan dalam perawatan software SIMDA serta masalah kurangnya pemahaman user ataupun pengguna SIMDA terhadap siklus laporan keuangan pada software SIMDA.

Mahsun dan Sulistiyowati (2012:35) mengemukakan laporan keuangan pemerintah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yakni antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mulyadi (2001:163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian yang keandalan data

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Mahmudi (2007:27) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansinya di dalamnya mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Warren et all (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, resiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*).

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas

penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. (<https://andichairulfurqan.wordpress.com>)

Agar laporan keuangan dapat dikategorikan berkualitas, maka dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan serta keahlian yang memadai dan di dukung oleh penerapan teknologi SIMDA agar dapat mempercepat dan memperakurat laporan keuangan pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hairul Mohammad (2014) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian terlebih dahulu dilakukan di Pemerintah Kota Daerah Gorontalo sedangkan penulis meneliti di Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten). Dan penelitian terdahulu tidak menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sedangkan penulis menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten)

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten
2. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten
3. Bagaimana penerapan teknologi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten
5. Seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi SIMDA, penerapan teknologi SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial dan simultan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten
3. Untuk mengetahui penerapan teknologi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten
4. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kota Serang Banten
5. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi SIMDA, penerapan teknologi SPIP terhadap kualitas keuangan Pemerintah Daerah secara parsial

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi, khususnya pengaruh kualitas sumber daya manusia penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk berbagai pihak diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menjelaskan mengapa faktor kualitas sumber daya manusia, penerapan SIMDA dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Untuk memberikan masukan bagi pimpinan perusahaan khususnya mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik yang dihasilkan oleh pemerintah daerah

Diharapkan juga dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di Pemerintah Daerah Kota Serang-Banten. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.

